



## INVESTASI EKONOMI JEPANG DI INGGRIS DALAM BIDANG INDUSTRI OTOMOTIF PADA MASA TRANSISI BREXIT 2014-2018

Sintia Catur Sutantri<sup>1</sup>, Dwi F. Moenardy<sup>2</sup>, Rakanita Junissa Fitri<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Prog. Studi Hubungan International, International Women University, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>Prog. Studi Perdagangan International, Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

sintia@iwu.co.id

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas tentang Investasi Ekonomi Inggris dan Jepang dalam industri otomotif pertanyaan dari penelitian ini yaitu bagaimana gambaran umum industri otomotif yang terjalin antara Inggris dan Jepang, serta bagaimana keberlanjutan investasi Jepang di Inggris pada tahun 2014-2018, dan apa saja tantangan investasi industri otomotif antara Inggris dan Jepang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui investasi Jepang dibidang industri otomotif yang berada di Inggris setelah Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit), serta menganalisis bagaimana perkembangan investasi industri otomotif Inggris dan Jepang setelah Inggris resmi keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Kerangka teori dalam penelitian ini adalah neoliberalisme sebagai grand theory, regionalisme ekonomi sebagai middle theory dan Foreign Direct Investment (FDI) sebagai applied theory, sebagai alat analisis untuk kasus yang diteliti penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen seperti buku, jurnal, koran, majalah dan skripsi. Adapun data primer yang diperoleh dengan wawancara dari narasumber ahli yang bersangkutan dengan judul penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana investasi yang terjalin antara Inggris dan Jepang, yang mengalami pasang surut terutama ketika terjadi Brexit yang menyebabkan ekonomi Inggris sempat mengalami penurunan, sehingga membuat Jepang khawatir terhadap investasinya di Inggris akan mengalami kerugian Jepang merasa akan sangat dirugikan jika Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa, sebab Jepang akan kehilangan pasar tunggal yang selama berinvestasi di Inggris menjadi salah satu keuntungan bagi Jepang. Tetapi disisi lain menjadi keuntungan juga bagi Inggris dengan adanya pasar tunggal.*

**Kata kunci:** Brexit; Ekonomi; Investasi Ekonomi; Otomotif;

### PENDAHULUAN

Industri mobil dalam seratus tahun terakhir dianggap sebagai salah satu industri yang penting terutama pada abad ke-20. Pengaruhnya dapat terlihat pada masyarakat perkotaan yang memiliki mobil-mobil mewah. Uni Eropa adalah produsen mobil terbesar di dunia meski produksinya perlahan menurun. Pada tahun 1989 Uni Eropa mengejutkan dunia dengan memproduksi 13,7 juta unit mobil, kemudian di peringkat kedua Amerika Utara dengan membuat 10,8 juta Unit mobil, lalu Jepang menduduki peringkat ke tiga dengan membuat 9 juta unit. Memasuki tahun 1990 Jepang melakukan banyak inovasi yang membuat para pesaing industri otomotif Amerika dan Eropa mengalami penurunan penjualan. Dengan pertumbuhan Industri Jepang yang sangat pesat pada akhirnya mampu mengantarkan Jepang menjadi pesaing yang kompetitif di Uni Eropa bahkan dunia (Graves, 1993).

Keberhasilan perusahaan otomotif Honda di Inggris membuat perusahaan otomotif besar Jepang lainnya mulai memasuki industri otomotif ke Inggris seperti Nissan dan Toyota. Hal ini menimbulkan optimisme bagi industri Inggris, namun sekaligus memberi dampak kekhawatiran bagi produsen otomotif Uni Eropa lainnya. Situasi ini menyoroti dua masalah utama bagi industri otomotif Eropa, diantaranya: persaingan produsen Uni Eropa harus menerapkan bentuk 'lean production' yang akan meningkatkan kinerja Eropa. Secara keseluruhan, ketidakmampuan Eropa sejauh ini untuk mengimplementasikan peningkatan kinerja menjadi perhatian yang substansial. Perubahan teknologi industri pada 1990-an menyebabkan produsen Eropa perlu mendapatkan kembali posisi Eropa mereka sebelumnya (Graves, 1993).



Duta Besar Jepang untuk Inggris mengeluarkan peringatan keras kepada perdana Menteri Inggris terhadap keputusan Brexit yang dinilai dapat mempengaruhi perusahaan otomotif Jepang. Isi dari peringatan tersebut terkait dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang akan meninggalkan Inggris karena keputusan Brexit yang dapat menimbulkan kerugian bagi Jepang. Perusahaan-perusahaan Jepang yang telah melakukan investasi besar di negara tersebut, 19 pemimpin industri Jepang termasuk Nissan, Toyota dan Honda telah menemui pihak pemerintah. Mereka menyampaikan kekhawatiran mereka terkait perdagangan setelah Inggris resmi memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa, Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan. Koji mengatakan jika tidak ada keuntungan dari melakukan perdagangan di Inggris, maka tidak hanya Jepang tapi seluruh perusahaan swasta dari luar negeri pun akan menghentikan operasi mereka di Inggris. Nissan misalnya telah memiliki pabrik di Sunderland dan mempekerjakan 7000 orang, sementara Honda memiliki pabrik di Swindon dengan 3000 orang. Sekitar 80% dari mobil produksi Inggris di peruntukkan bagi kebutuhan ekspor, akibatnya segala keputusan yang menyangkut hubungan kerja sama di negara tersebut sangat mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang terlibat (Adi Hidayat, 2018).

Keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa membuat Jepang merasa terancam terutama dalam bidang bisnis industri otomotif. Keuntungan yang didapatkan Inggris selama bergabung di Uni Eropa menjadi peluang besar bagi Jepang dan tentunya peluang tersebut sangat dimanfaatkan oleh Jepang untuk membangun perusahaan otomotif di Inggris. Salah satu keuntungan yang didapatkan Inggris selama bergabung dengan Uni Eropa yaitu, sebagai salah satu negara tujuan investasi Uni Eropa, Inggris merupakan penerima keuntungan utama sebesar 47% dari saham yang masuk ke dalam FDI (*Foreign Direct Investment*) diakhir tahun 2011 dengan nilai investasi lebih dari \$1,2 triliun. Akses terhadap pasar tunggal juga membantu menarik investasi ke dalam Inggris yang berasal dari luar Uni Eropa, hal inilah yang dilihat oleh Jepang sebagai peluang (EU, 2018).

Dalam proses harmonisasi hubungan Inggris di Uni Eropa yang telah berlangsung sejak tahun 1973, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Inggris memutuskan untuk menarik diri dari Uni Eropa yakni:

1. Bangkitnya Dukungan Terhadap Euroskeptisme

Salah satu alasan yang menyebabkan Cameron mengeluarkan janji politiknya adalah untuk membendung tekanan pergerakan euroskeptis yang semakin massif serta untuk mencegah bangkitnya dukungan masyarakat terhadap partai UKIP (*United Kingdom Independence Party*) yang selama ini memperjuangkan penarikan diri Inggris dari Uni Eropa.

Euroskeptisme merupakan sebuah paham yang menginginkan pemutusan hubungan dengan Uni Eropa atau dapat diartikan sebagai oposisi dalam proses integrasi politik Eropa. Partai politik yang berpandangan euroskeptis biasanya cenderung memperhatikan masalah-masalah seputar populasi dan imigran. Dalam hal ini, partai UKIP merupakan partai berpandangan euroskeptis yang memiliki pendukung cukup besar di Inggris. Para pendukung partai ini selalu mengkritisi keberadaan imigran yang dianggap tidak berguna bagi kemajuan Inggris. ([www.britannica.com](http://www.britannica.com)).

Paham euroskeptisme terus berkembang di Inggris sebagai salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat yang kecewa terhadap kebijakan UE. Pada mulanya paham ini hanya memiliki sedikit dukungan, namun seiring perkembangannya jumlah dukungan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *British Social Attitudes* menunjukkan bahwa pada tahun 1990-an hingga tahun 2000 suara anti Eropa masih cenderung stabil, namun memasuki tahun 2006 hingga 2012 suara mereka meningkat tajam dari 15% menjadi 30%.

2. Besarnya Iuran Uni Eropa

Layaknya sebuah club, setiap negara anggota harus membayar iuran tahunan kepada Uni Eropa yang diperuntukan bagi kebijakan-kebijakan Eropa seperti kebijakan pertanian, bantuan bagi negara anggota yang lebih miskin, penelitian, dan beberapa proyek pembangunan Uni Eropa.



Pada tahun 2015 Inggris merupakan negara kontributor anggaran terbesar ketiga setelah Jerman dan Perancis dengan jumlah pembayaran sebesar 17,8 miliar sehingga setiap orang di Inggris harus menyumbang sebesar 200 Euro dalam anggaran Uni Eropa. Dalam konteks ini, iuran Inggris kepada Uni Eropa jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran dalam negeri yang hanya berjumlah 9 miliar Euro per tahun. Disamping itu, besarnya jumlah iuran yang dibayarkan Inggris tidak sebanding dengan penerimaan yang diperoleh kembali, hal ini terlihat dalam data parlemen Inggris yang menunjukkan bahwa iuran bersih yang diberikan Inggris sejak di tahun 2010 rata-rata sebesar 12-14 miliar Euro, sedangkan penerimaan menunjukkan bahwa Inggris hanya menerima rata-rata sebesar 3-4,6 milyar Euro. Dengan adanya ketimpangan dalam hal kontribusi dan penerimaan anggaran ini, Inggris merasa terbebani dengan iuran yang harus dibayarkan pada Uni Eropa (eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 5, Nomor 3, 2017: 1025-1040).

### 3. Kebijakan Uni Eropa yang Tidak Efisien

Inggris merupakan salah satu negara yang aktif memberikan kritik terhadap kinerja CAP (*Common Agricultural Policy*). CAP merupakan sebuah sistem subsidi dan dukungan bagi pertanian yang dijalankan oleh Uni Eropa dengan tujuan untuk menjamin level minimum produksi pertanian sehingga warga Eropa memiliki kecukupan bahan pangan dan mengatur harga produk pertanian.

Kritik Inggris terhadap CAP berkaitan dengan penggunaan anggaran yang sangat besar (70% dari anggaran Uni Eropa), namun hanya dirasakan oleh 20% petani Eropa. Menurut Inggris, kebijakan CAP hanya menguntungkan negara dengan sektor pertanian besar seperti Jerman dan Perancis, sementara Inggris yang juga merupakan kontributor utama anggaran UE hanya mendapatkan bagian yang sangat kecil. Kekecewaan Inggris terhadap CAP pernah dimanifestasikan oleh Margaret Thatcher dengan melakukan tuntutan rebate dalam anggaran Inggris ke Uni Eropa, hingga pada akhirnya Uni Eropa mengabulkan tuntutan rebate tersebut. Selain itu, di tahun 2005 PM Tony Blair juga pernah menyatakan bahwa CAP harus melakukan perbaikan dan menghilangkan pemborosan dalam proyek-proyek pertanian yang tidak efisien.

Sikap penentangan Inggris terhadap kebijakan Uni Eropa ini dapat dipahami sebagai bentuk perjuangan terhadap kepentingan nasionalnya. Namun dalam hal ini Inggris mengabaikan sebuah prinsip bahwa keberadaan negara anggota Uni Eropa tidak sekedar untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing, namun juga untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

### 4. Permasalahan Eurozone

Berdasarkan poin pertama dalam tuntutan Inggris, disebutkan bahwa Inggris menginginkan perlindungan terhadap akses pasar tunggal, sekalipun Inggris bukan termasuk dalam anggota zona Euro. Adapun pada tahun 2003, Menteri Keuangan Inggris Gordon Brown menyatakan bahwa Inggris perlu untuk menjalani lima tahapan uji coba sebelum masuk kedalam zona Euro. Tahap pertama adalah penyesuaian siklus bisnis dan struktur ekonomi sehingga Inggris dapat berjalan sesuai dengan tingkat suku bunga zona Euro. Tahap dua adalah bahwa sistem dalam zona Euro cukup flexibel untuk menyelesaikan permasalahan anggota secara individu maupun kolektif. Tahap ketiga bahwa dengan mengadopsi Euro akan menjamin kondusifitas bagi perusahaan maupun individu yang berinvestasi di Inggris. Tahap keempat bahwa Euro memungkinkan bagi industri jasa keuangan nasional untuk tetap berada dalam posisi kompetitif dalam kancah internasional. Tahap terakhir bahwa dengan mengadopsi Euro seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan peningkatan lapangan pekerjaan. Namun setelah dua tahun masa penentuan penerimaan Euro, Gordon Brown memutuskan bahwa Inggris tidak masuk ke dalam zona Euro karna lima tahap percobaan yang diajukan mengalami kegagalan.

Alasan lain yang menyebabkan Inggris tidak dapat menerima Euro adalah bahwa pemerintah tidak ingin melepaskan kendali atas nilai suku bunga kepada mekanisme Euro, sebab hal tersebut akan mengurangi kenyamanan bagi investor yang terbiasa menukarkan pounds dan dolar namun harus berubah sesuai dengan nilai euro. Selain itu, dengan bergabung kedalam Zona Euro nilai suku bunga Inggris akan diatur oleh ECB (*European Central Bank*) dan hal ini akan menyebabkan masalah ketika nilai suku bunga ECB lebih



tinggi dibandingkan pounds, sebab konsumen industri properti Inggris sangat sensitif pada perubahan tarif dasar.

Setelah Inggris memutuskan untuk berada diluar Zona Euro, maka muncul sebuah konsekuensi dimana terdapat perbedaan yang cukup nampak antara negara anggota dan non anggota Zona Euro. Dalam hal ini, negara Non-Zona Euro tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan negara Zona Euro sehingga menyebabkan hilangnya kesempatan bagi Inggris untuk terlibat dalam kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan dalam kerangka internal Zona Euro. Perlakuan khusus UE terhadap Zona Euro dalam hal regulasi maupun mekanisme perdagangan membuat Inggris berasumsi bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap negara non-Zona Euro. Asumsi tersebut muncul berdasarkan ketentuan UE bahwa dalam sebuah perundingan, negara Zona Euro dapat mengeluarkan negara Non-Zona Euro, walaupun keputusan UE seringkali melibatkan persetujuan keseluruhan anggota.

Untuk menjawab tuntutan Inggris mengenai permasalahan Zona Euro, maka Uni Eropa memberikan sebuah kesepakatan yang menjamin bahwa negara Non-Zona Euro seperti Inggris tidak akan didiskriminasikan serta kesepakatan bahwa hak veto bagi negara Zona Euro akan dihilangkan.

#### 5. Imigran

Kebijakan Uni Eropa mengenai kebebasan perpindahan manusia di satu sisi memberikan manfaat bagi Inggris dalam memudahkan arus mobilitas. Namun disisi lain kebijakan tersebut membuka akses yang besar bagi masuknya pekerja imigran. Berdasarkan data statistik nasional, sekitar 2.938.000 warga Uni Eropa tinggal di Inggris, jumlah ini menempati 4,6% dari total populasi Inggris di tahun 2014. Berdasarkan data yang dirilis oleh CEP (*Centre of Economic Performance*) menyatakan bahwa antara tahun 1995-2015 jumlah imigran di Inggris meningkat tiga kali lipat dari 0,9 juta menjadi 3,3 juta jiwa. Hampir 70% imigran UE menyatakan bahwa kedatangan mereka ke Inggris berhubungan dengan masalah pekerjaan. Besarnya arus imigran di Inggris menyebabkan munculnya permasalahan sosial berupa persaingan dalam pasar tenaga kerja. Berdasarkan data ([www.Ise.ac.uk](http://www.Ise.ac.uk)) persentase tenaga imigran UE jauh lebih besar dibandingkan tenaga kerja lokal dengan rentang sebesar 20% serta persentase distribusi pekerjaan diberikan lebih besar kepada warga imigran baik imigran yang berasal dari UE maupun diluar UE, sedangkan jumlah persentase lebih kecil diperoleh tenaga kerja lokal.

Dari pemaparan latar belakang diatas, telah dijelaskan dari mulai sejarah bagaimana perkembangan industri otomotif hingga kepada perkembangan industri otomotif Jepang yang bisa menembus pasar Eropa mengalahkan Amerika Serikat. Jepang melihat peluang dari Inggris yang pada saat itu bergabung dalam Uni Eropa dan Jepang itu adalah sebagai peluang besar untuk kemajuan industri otomotifnya di Eropa. Sampai pada 26 juni 2016 Inggris membuat keputusan untuk keluar dari Uni Eropa, yang menimbulkan sedikit kesenjangan antara Inggris dan Uni Eropa sehingga hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi Jepang sebab Jepang tidak ingin dirugikan dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang menyebabkan perusahaan-perusahaan otomotif Jepang mengalami kerugian yang besar. Hingga pada akhirnya Inggris melalui Perdana Menteri Theresa May, memutuskan untuk memperkuat kerja sama dengan Jepang dalam bidang industri otomotif, sebab Inggris merasaterancam jika Jepang harus memindahkan pabriknya dari Inggris ke negara Eropa yang lain. Sebagai penyebab berkurangnya investasi di Inggris.

## TINJAUAN PUSATAKA

### Regionalisme Ekonomi

Kerjasama kawasan dapat mengacu pada regionalisme maupun regionalisasi. Regionalisme atau yang sering disebut sebagai proses formal dari regionalisasi. Pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, dan saling ketergantungan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional. Salah satu dampak adanya regionalisasi yaitu individu-individu yang ada di dalamnya menjadi semakin bebas melintas batas negara mereka,



terutama dalam kaitannya dengan perdagangan bebas. Dalam hal ini, regionalisme kemudian disebut-sebut sebagai langkah bagi terciptanya globalisasi karena ia memudahkan aktor hubungan internasional untuk saling bekerja sama dan berinteraksi, seperti dalam kasus Uni Eropa. Namun adakalanya regionalisme juga dapat menjadi batu penghalang bagi terciptanya globalisasi, yaitu ketika ia mengkotak-kotakkan satu region dengan region yang lain sehingga sulit bagi mereka untuk menjadi sesuatu yang menggloabal karena terpisah-pisah. menjadi sesuatu yang menggloabal karena terpisah-pisah (Budi Winarno, 2011).

Konsep regionalisme ekonomi mencakup regionalisme di bidang perdagangan dan keuangan. Pesatnya perkembangan regionalisme ekonomi membuat banyak teori yang berupaya untuk menjelaskan fenomena tersebut. Terdapat dua kelompok literatur dengan pendekatan atau teori yang berbeda dalam memaparkan konsep regionalisme ekonomi (Giplin, 2001).

Di sisi lain, *developmental regionalism* berarti upaya sekelompok negara dalam suatu kawasan geografis untuk meningkatkan *economic complementarity* dari unit politik dan kapasitasnya sebagai ekonomi kawasan melalui strategi pembangunan yang lebih komprehensif. Dari sisi aktor, berbagai referensi akademik mengenai regionalisme yang berkembang pada tahun 1950 hingga 1960-an hanya melihat negara sebagai satu-satunya aktor yang diakui dalam pembentukan regionalisme. Di sisi lain, baik Hettne dan Higgott menyatakan bahwa literatur mengenai regionalisme yang berkembang pasca-Perang Dingin tidak lagi melihat negara sebagai aktor utama, namun meluas hingga melibatkan aktor non-negara (Schoeman, 2009).

### **Foreign Direct Investment (FDI)**

Menurut Sthepen Hymer yang dianggap sebagai pelopor dalam teori investasi luar negeri, Hymer mengemukakan suatu pendekatan organisasi industri yang menekankan peranan keunggulan khas perusahaan dan ketidaksempurnaan pasar dalam usaha menjelaskan motivasi yang mendasari perusahaan dalam melakukan investasi. Menurut pendekatan ini, pengembalian investasi yang lebih tinggi di luar negeri tidak menjamin kelengkapan penjelasan arus modal, karena pengembalian investasi itu sendiri berarti bahwa modal akan lebih efisien bila dialokasikan melalui pasar modal dan tidak memerlukan pemindahan perusahaan. Sehubungan dengan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang sudah ada atau potensial di negara tuan rumah agar dapat menutup kerugian ketidakunggulan operasi perusahaan tersebut di luar negeri (Swati Dhingra et al., 2018).

R. Vernon juga mengemukakan suatu teori investasi luar negeri dimana teori ini dikenal dengan nama teori "*Product Cycle*" dalam produksi internasional, model ini terdiri dari atas beberapa tahap, antara lain: 1) Tahap inovasi, yaitu produk masih belum distandarisasi dan dipasarkan di dalam negeri. Perusahaan mempunyai keuntungan teknologi yang bersifat sementara untuk mengatasi pertimbangan biaya karena ia berusaha di dekat pasar, 2) Tahap dimana perusahaan mulai memikirkan kemungkinan mencari pasar-pasar baru dinegara-negara yang relatif maju dan ekspor pun mulai dilakukan dengan tujuan pada negara dunia ketiga. Keuntungan perusahaan terletak pada skala ekonomi dalam produksi, pengangkutan dan pemasaran. Strategi-strategi penentuan harga dan lokasi didasarkan atas aksi dan reaksi multinational corporation yang lain dan bukan pada biaya kooperatif, 3) Tahap dimana produk sudah terstandarisasi sehingga riset keterampilan manajemen tidak lagi penting.

### **METODE PENELITIAN**

Analisis terhadap penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan eksplanatori serta penggunaan data-data sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif dapat dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial dan menitikberatkan pada permasalahan yang berkaitan dengan perilaku dan peran organisasi, kelompok dan individu. Hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu mengenai investasi Jepang di Inggris dalam bidang industri otomotif yang terpengaruh oleh gejala Brexit. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mencari informasi melalui buku, internet dan jurnal untuk kemudian dianalisis dengan teori dalam Hubungan Internasional.



## HASIL DAN DISKUSI

### Gambaran Investasi Inggris Dalam Bidang Industri Otomotif

Pada tahun 2014 mobil Inggris tidak begitu familiar di masyarakat, salah satu contohnya di Indonesia. Meskipun begitu, kemajuan industri otomotif Inggris semakin hari kian pesat di negara lain. Terbukti Inggris mampu memproduksi 1 juta unit kendaraan dalam rentang waktu 9 bulan saja. Dikutip dari *Motoringresearch* pada bulan September 2014, Inggris berhasil menembus angka produksi kendaraan sebanyak 137.068 unit. Meskipun tidak selalu berjalan mulus, pada bulan Juli 2014 produksi sempat menurun 2,8%. Hal ini pun berdampak pada 8,1 % terhadap ekspor. Meskipun begitu, hal tersebut tidak terlalu berdampak untuk pasar dalam negeri Inggris yang tumbuh secara signifikan sebesar 17,7%. Hal ini pula yang mengantarkan Inggris menjadi pemegang rekor produksi terbaik dalam 6 tahun terakhir terhitung mundur dari tahun 2014 yang sebelumnya pernah terjadi pada tahun 2008 lalu. Hal ini tentu membuktikan jika Inggris juga memiliki industri otomotif yang disegani di Eropa (Sanjaya, 2014).

Para pecinta otomotif dan mitra dagang industri otomotif Inggris merasakan dampak yang sangat positif pada tahun 2015 dengan meningkatnya 2,7% perdagangan otomotif di dunia dan permintaan untuk pembuatan mobil meningkat hingga 11% untuk pangsa pasar Eropa yang disebabkan oleh memulihkannya perekonomian di Uni Eropa. Menurut Hawes, meskipun ada tantangan ekspor di beberapa pasar seperti Rusia dan Cina, namun permintaan negara-negara lainnya untuk mobil buatan Inggris telah menjadi kuat dan merupakan rekor pertama untuk ekspor pada tahun lalu. Eropa adalah mitra dagang terbesar Inggris dan keanggotaan Inggris di Uni Eropa sangat penting bagi sektor otomotif untuk mengamankan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan di masa depan (BBC.com, 2016).

Kinerja ekonomi Inggris masih cukup solid pada TW1-17, atau tiga triwulan pasca referendum Brexit (23 Juni 2016). PDB pada TW1-17 tumbuh meningkat mencapai 2,0% yoy, dari 1,9% pada TW4-16, didorong oleh peningkatan investasi dan pengeluaran pemerintah. Peningkatan investasi dan aktivitas perdagangan berdampak pada perbaikan sektor ketenagakerjaan yang ditandai oleh penurunan tingkat pengangguran. Namun demikian, daya beli masyarakat cenderung melemah akibat kenaikan upah yang masih lambat di tengah tekanan inflasi yang terus meningkat akibat kenaikan harga minyak dan depresiasi GBP sehingga pertumbuhan konsumsi melambat. Selain itu, net ekspor juga menekan pertumbuhan oleh karena impor yang meningkat lebih tinggi dibanding ekspor. Secara sektoral, pertumbuhan PDB TW1-17 dikontribusi oleh peningkatan pada sektor produksi dan agrikultur. Sementara itu, akselerasi sektor jasa yang merupakan penopang utama ekonomi Inggris agak tertahan (PEKKI, 2020). Di sisi lain, *developmental regionalism* berarti upaya sekelompok negara dalam suatu kawasan geografis untuk meningkatkan *economic complementarity* dari unit politik dan kapasitasnya sebagai ekonomi kawasan melalui strategi pembangunan yang lebih komprehensif.

Dalam rangka menunjukkan kekuatan bisnis Inggris serta kepercayaan diri dalam hubungan kerjasama ekonomi Inggris-Jepang seiring keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan potensi pertumbuhan di masa depan. Perdana Menteri May melakukan kunjungan awal ke Jepang setelah sebelumnya, PM May telah tiga kali bertemu dengan PM Abe. Kedua PM pernah bertemu dalam forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 2016.

Pertemuan kedua berlangsung di kediaman resmi PM May saat PM Abe berkunjung ke Inggris, pada April 2017. Pada pertemuan kedua ini membahas berbagai persoalan internasional. Sementara itu, pertemuan terakhir mereka yaitu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Grup 20 (G-20) ke-12 di Hamburg, Jerman, Juli 2017. PM Jepang Shinzo Abe meminta May untuk melakukan berbagai hal guna mencegah kekacauan Brexit yang dikhawatirkan sejumlah perusahaan raksasa Jepang. Perusahaan-perusahaan Jepang sudah menggelontorkan dana 46 miliar pounds atau sekitar Rp 82,9 triliun di Inggris, berkat upaya pemerintah Inggris sejak Margaret Thatcher menjanjikan mereka tempat yang ramah untuk perdagangan ke Eropa.



### **Keberlanjutan Investasi Jepang di Inggris Tahun 2014-2018**

Inggris berkomitmen untuk memperkuat hubungan baik dengan banyak negara yang potensial pasca *Brexit*, secara khusus Inggris tertarik untuk memperkuat industri otomotif dan menjalin sebuah perjanjian perdagangan dengan Jepang. Perdana Menteri Inggris, Theresa May mengunjungi Jepang untuk melakukan pertemuan dengan *Chairman* Toyota Takeshy Uchiyamada, *Chief Executive Officer* (CEO) Nissan Hiroto Saikawa dan pemimpin Hitachi Hiroaki Nakanishi. Pertemuan tersebut membahas tentang perkembangan industri otomotif kedua negara. Setelah pertemuan tersebut, May juga melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Pemerintah Inggris, mengatakan bahwa akan ada sebuah kesepakatan perdagangan baru antara Inggris dan Jepang dalam industri otomotif yang diharapkan akan segera di setujui oleh Jepang (Graves, 1993).

Hubungan industri otomotif Jepang dan Inggris memasuki tahun ke 36 di tahun 2017. Menurut angka yang di liris oleh SMMT, permintaan mobil merek Jepang di negara Inggris melonjak hingga 38,2% selama setengah dekade terakhir. Pada saat bersamaan mobil produksi Inggris meningkat 34,5% juga dikalangan masyarakat Jepang, hal ini menjadikan Jepang sebagai pasar ekspor terbesar ke enam Inggris dan menjadi pasar terbesar ke dua dipasar Asia setelah Cina.

Memasuki tahun 2018 Toyota akan membuat mobil Auris versi terbaru di pabrik Derbyshire, meskipun masih adanya ancaman yang terkait dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Inggris berhasil untuk menenangkan Jepang. Pembuatan mobil Auris ini akan menggunakan mesin yang paling tinggi dari pabrik Welsh Deeside. Langkah ini mengikuti investasi sebesar £ 240 juta untuk memasang kembali mesin Burnaston dan peralatan yang memungkinkannya untuk membangun kendaraan Toyota generasi berikutnya (Muhammad, 2017).

Kinerja ekonomi Inggris masih cukup solid pada TW1-17, atau tiga triwulan pasca referendum *Brexit* (23 Juni 2016). PDB pada TW1-17 tumbuh meningkat mencapai 2,0% yoy, dari 1,9% pada TW4-16, didorong oleh peningkatan investasi dan pengeluaran pemerintah. Peningkatan investasi dan aktivitas perdagangan berdampak pada perbaikan sektor ketenagakerjaan yang ditandai oleh penurunan tingkat pengangguran. Namun demikian, daya beli masyarakat cenderung melemah akibat kenaikan upah yang masih lambat di tengah tekanan inflasi yang terus meningkat akibat kenaikan harga minyak dan depresiasi GBP sehingga pertumbuhan konsumsi melambat. Selain itu, net ekspor juga menekan pertumbuhan oleh karena impor yang meningkat lebih tinggi dibanding ekspor. Secara sektoral, pertumbuhan PDB TW1-17 dikontribusi oleh peningkatan pada sektor produksi dan agrikultur. Sementara itu, akselerasi sektor jasa yang merupakan penopang utama ekonomi Inggris agak tertahan (PEKKI, 2020).

Dengan mempertimbangkan *trade off* antara ekspektasi inflasi dan proyeksi ekonomi yang diprediksi melambat akibat ketidakpastian *Brexit*, *Bank of England* (BoE) tetap mempertahankan *stance* kebijakan moneter akomodatif. BoE mempertahankan suku bunga kebijakan (*Bank Rate*) di level 0,25% dan melanjutkan program pembelian aset. Sementara di sisi kebijakan fiskal, pemerintah melonggarkan target defisit fiskal dan utang jangka pendek dari target semula. Pemerintah juga mengimplementasikan *Industrial Strategy* untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka menciptakan negara yang kuat, adil dan sukses pasca *Brexit*. Setelah membukukan pertumbuhan sebesar 1,8% yoy di 2016, BoE memprediksi PDB 2017 akan tumbuh 1,9% yoy (revisi ke bawah dari proyeksi sebelumnya sebesar 2%) dan selanjutnya melambat ke 1,7% pada 2018 (revisi dari 1,6%).

Terkait pasang surutnya perekonomian Inggris, Jepang sebagai salah satu negara yang berinvestasi di Inggris dalam bidang otomotif sangat khawatir investasi otomotifnya terkena imbas dari pasang surutnya perekonomian Inggris karena *Brexit*. Terkait dengan hal ini untuk membahas lebih lanjut terhadap investasi Jepang di Inggris, Kedutaan Besar Jepang dan beberapa organisasi perdagangan Jepang dan Inggris pada tanggal 4 oktober 2016 menyelenggarakan pertemuan penting terkait dengan *Brexit* “Perdagangan dan Investasi post-*Brexit*”. Acara ini merupakan kesempatan bagi perusahaan Jepang untuk menerima pengarahan dari pemerintah Inggris mengenai persiapan untuk keluar dari hubungan perdagangan dan investasi Uni Eropa



dengan Inggris dan Jepang. Ini adalah kesempatan untuk menumbuhkan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah Inggris dan perusahaan Jepang melalui pertukaran pendapat terbuka. Dalam pengarahannya, Lord Price CVO, Menteri Negara di Departemen Perdagangan Internasional Inggris, menjelaskan pendekatan pemerintah Inggris saat ini terhadap keluarnya dari Uni Eropa dan tentang prioritas untuk Inggris sehubungan dengan kebijakan perdagangannya di masa depan (PEKKI, 2020).

Pemaparan diatas diikuti oleh diskusi terbuka dengan dihadiri sekitar 100 perusahaan Jepang. Lord Price mengartikulasikan bahwa kesepakatan masa depan dengan Uni Eropa akan mencerminkan posisi Inggris sebagai ekonomi global yang terbuka dan akan mempertimbangkan keinginan perusahaan Jepang untuk melihat rezim yang jelas untuk melakukan pergerakan barang antara Inggris dan Uni Eropa kemudian pemeliharaan lingkungan investasi yang kondusif akan menjadi fokus berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan industri jasa dan memungkinkan kelancaran transaksi keuangan di seluruh Eropa (Japan.go.jp, 2016).

Perusahaan-perusahaan Jepang juga memperjelas keinginan mereka untuk melihat tidak ada hambatan untuk mengakses tenaga kerja Eropa dengan keterampilan yang diperlukan untuk memastikan perusahaan dapat bersaing di panggung global dan mempertahankan peraturan dan standar yang selaras antara Inggris dan Uni Eropa. Selama diskusi, Lord Price CVO menekankan pentingnya hubungan perdagangan dan investasi antara Jepang dan Inggris dan menekankan perlunya kedua negara untuk bekerjasama dalam kemitraan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang disajikan oleh Brexit. Lord Price CVO juga menekankan pentingnya acara semacam itu untuk pemerintah Inggris dan perusahaan Jepang, dan berjanji bahwa Inggris akan memastikan bahwa perusahaan Jepang dapat terus berkembang di Inggris setelah keputusan untuk meninggalkan Uni Eropa (Japan.go.jp, 2016).

Pada bulan Maret 2017, pemerintah Inggris menyatakan dukungannya apabila Toyota jadi menanamkan modalnya di negara tersebut. Saat ini Toyota telah menguasai 10 persen dari sekitar 1,7 juta kendaraan yang diproduksi di Inggris. Toyota juga telah mengeluarkan 21,3 juta pound untuk peningkatan kualitas SDM, dan penelitian. Baik Nissan, Toyota maupun Honda telah menguasai sekitar separuh industri otomotif di Inggris. PM Shinzo Abe yang bertemu PM Inggris, Theresa May, April lalu juga telah meminta Inggris agar tidak “Tergesa-gesa” keluar dari Uni Eropa agar perusahaan Jepang di negara tersebut masih bisa melanjutkan usahanya (Muhammad, 2017).

Hubungan industri otomotif Jepang dan Inggris memasuki tahun ke 36 di tahun 2017. Menurut angka yang di liris oleh SMMT, permintaan mobil merek Jepang di negara Inggris melonjak hingga 38,2% selama setengah dekade terakhir. Pada saat bersamaan mobil produksi Inggris meningkat 34,5% juga dikalangan masyarakat Jepang, hal ini menjadikan Jepang sebagai pasar ekspor terbesar ke enam Inggris dan menjadi pasar terbesar ke dua dipasar Asia setelah Cina. Pertumbuhan pasar Inggris di Jepang dikarenakan masyarakat Jepang lebih menyukai selera mobil yang mewah, premium dan mesin yang semakin canggih, Inggris sendiri menjadi penghasil mobil mewah ke 2 setelah negara Jerman, angka-angka produksi terbaru ini menunjukkan bahwa pada awal tahun 2017 12.656 pengendara Jepang lebih memilih mobil buatan Inggris (smtt.co.uk., 2017). Honda pada awal tahun 2017 berencana akan menambah investasi di negara Inggris dengan membangun pabrik baru sebagai perluasan pabrik di wilayah Burnaston, namun disebabkan adanya Brexit pihak Honda akan menunda pembangunan pabrik dan hal serupa pun dilakukan oleh perusahaan Nissan yang akan membuat 2 model baru kendaraan listrik, bagi perusahaan Jepang yang berada di Inggris kebijakan tarif akan menjadi hal yang sangat penting untuk kedepannya.

### **Tantangan Investasi Otomotif Inggris dan Jepang**

Hubungan investasi antara Inggris dan Jepang tidak selalu berjalan mulus, dan begitu banyak hambatan-hambatan yang dihadapi keduanya. Mulai dari pasang surutnya perekonomian Inggris sampai kepada ancaman Jepang yang akan menutup pabrik otomotifnya di Inggris yang khawatir terkena dampak dari Brexit yang dapat menyebabkan kerugian bagi Jepang. Tantangan-tantangan tersebut pertama datang dari Inggris sendiri dan berdampak pada Inggris dan juga



Jepang yaitu, perusahaan-perusahaan Inggris menyiapkan pemangkasan investasi terbesar dalam 10 tahun terakhir pada 2019 akibat Brexit. Bahkan jika Perdana Menteri Theresa May mendapatkan kesepakatan untuk memudahkan Inggris keluar dari Uni Eropa. *British Chambers of Commerce* (BCC), memperkirakan bahwa investasi bisnis bisa turun 1% tahun ini. Investasi yang lemah oleh perusahaan menyeret produktivitas yang menyebabkan kenaikan upah naik dan membebani perekonomian secara keseluruhan.

Menurut Adam Marshall, Direktur Jenderal BCC kelambanan politik telah memiliki konsekuensi ekonomi dengan banyak perusahaan yang mengerem keputusan investasi dan rekrutmen. Lebih buruk lagi, beberapa perusahaan telah memindahkan investasi dan rencana pertumbuhan sebagai bagian dari persiapan darurat mereka. Sebagian dari investasi ini mungkin tidak akan pernah kembali ke Inggris. Banyak perusahaan keuangan telah mendirikan operasi di negara-negara Uni Eropa lainnya. Produsen mobil pun mengurangi rencana ekspansi mereka di Inggris. Salah satunya BMW yang mengatakan mereka bisa memindahkan beberapa produksi jika Brexit tidak ada kesepakatan. Pada tahun 2018, investasi bisnis turun setiap kuartal. Angka resmi menunjukkan bahwa ini adalah periode penurunan paling panjang sejak krisis keuangan global. Menteri Keuangan Philip Hammond berharap, investasi akan mulai naik setelah kesepakatan Brexit dilakukan. Tetapi BCC mengatakan bahwa pengalihan sumber daya untuk mempersiapkan risiko Brexit tanpa kesepakatan dan biaya tinggi untuk berbisnis di Inggris, serta hubungan masa depan Inggris dengan Uni Eropa, akan membatasi pemulihan investasi (Campbell, 2018).

Tantangan bagi Inggris dalam investasi, jika diperhatikan dari naik turunnya perekonomian Inggris akibat Brexit dan hal tersebut mempengaruhi terhadap investasi asing ke Inggris. Namun tidak selamanya berdampak negatif ketika Inggris mengalami pasang surut perekonomiannya, nilai investasi asing langsung di Inggris meningkat di tahun 2017 tahun pertama setelah mayoritas warga Inggris memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa. Peningkatan ini sekaligus yang tertinggi sejak delapan tahun terakhir. Kantor Statistik Nasional Inggris melansir bahwa investasi jangka panjang di Inggris oleh perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri mencapai 1,564 triliun poundsterling atau setara USD 2,06 triliun. Nilai ini lebih tinggi 12 miliar poundsterling alias 0,8% dibandingkan tahun 2016 (Ventura, 2018).

Ditengah ombang-ambingnya perekonomian Inggris, disisi lain Jepang yang juga mitra Inggris dalam berinvestasi mendapatkan ancaman dari luar terhadap perang dagang yang pada akhirnya Jepang harus menahan investasinya termasuk investasinya ke Inggris. Di tengah kekhawatiran dampak perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan Jepang berencana meningkatkan belanja modal di tahun ini. Namun, mereka tetap waspada dan menahan investasi hingga ada kepastian terkait perang dagang. Ketatnya tarif impor dan ketidakpastian perang dagang ikut berimbas pada perusahaan Jepang, terutama yang memiliki bisnis di Cina. Investasi Jepang dipengaruhi gesekan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, jadi Jepang menahan investasi sampai prospek menjadi jelas. Pembuat motor Nidec Corp dan produsen peralatan otomasi Yaskawa Electric Corp juga sempat memangkas laba operasional tahunan mereka karena melemahnya permintaan dari Cina (Pertiwi, 2019).

Survei perusahaan menunjukkan sekitar 40% perusahaan Jepang melihat gesekan perang dagang dapat berimbas pada penjualan dan rencana laba pada tahun fiskal berikutnya. Namun, perusahaan besar mengatakan tetap berencana meningkatkan investasi sebesar 14,3% di tahun fiskal yang berakhir Maret. Di sisi lain, meningkatnya tensi perang dagang menjadi ancaman bagi Jepang dan membuat perusahaan global menggeser rantai produksi dan pasokan keluar dari Cina. Mereka mencari fasilitas baru di beberapa negara Asia dan membangun rantai pasokan baru. Sebanyak 25% perusahaan yang disurvei menyebut akan meninjau rantai pasokan mereka di tahun fiskal mendatang.

Perang dagang ini juga berimbas pada kesejahteraan karyawan di perusahaan Jepang. Ketidakpastian prospek laba di tahun ini jadi alasan perusahaan tak menaikkan gaji pokok. Di antara perusahaan yang berencana menaikkan gaji pokok, hanya satu dari 10 yang bermaksud menaikkan gaji dalam jumlah besar. Sebab, konsumsi swasta menyumbang 60% dari ekonomi.

Tantangan investasi Inggris dan Jepang ini dianalisis menggunakan Konsep *Foreign Direct Investment* (FDI) dimana perusahaan multinasional bisa mengembangkan anak perusahaan



mereka di negara lain yang menjadi tujuan ekspor dalam rangka mempermudah kegiatan ekspor-impor serta menghemat biaya. Transfer teknologi serta pengetahuan antar negara. Sejalan dengan pendapat R. Vernon mengenai *Product Cycle*, maka Jepang telah berupaya untuk melakukan inovasi, mengembangkan pasar baru dan mencari standarisasi dari produk yang diciptakan sesuai dengan riset, sehingga tantangan mengenai investasi pasca transisi brexit ini seharusnya bisa diatasi dengan baik.

## SIMPULAN

Dari hasil pemaparan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa pada tahun 2020 Inggris resmi keluar dari Uni Eropa. Setelah keluar dari Uni Eropa Inggris memfokuskan kerja sama dengan Jepang dalam bidang industri otomotif. Pertemuan antara Perdana Menteri Inggris, Theresa May mengunjungi Jepang untuk melakukan pertemuan dengan Chairman Toyota Takeshy Uchiyamada, *Chief Executive Officer* (CEO) Nissan Hiroto Saikawa dan pemimpin Hitachi Hiroaki Nakanishi.

Turunnya penjualan otomotif produk Jepang di Inggris disebabkan oleh menurunnya kepercayaan konsumen setelah Inggris memutuskan untuk pisah dengan Uni Eropa. Sedangkan di sisi lain, beberapa produsen automotif memutuskan untuk menaikkan harga jual mobil di Inggris. Dalam hal ini, Inggris ingin menentukan perannya yang baru di panggung dunia.

Solusi untuk investasi otomotif Jepang di Inggris pasca brexis dianalisis dengan konsep regionalisasi ekonomi, *Foreign Direct Investment (FDI)* dan *Product Cycle*. Regionalisasi ekonomi memberikan dampak terhadap semakin bebasnya perdagangan sehingga menciptakan globalisasi. Namun di satu sisi juga memberikan dampak negatif karena sebuah wilayah menjadi terkotak-kotak. Maka dari itu, pengambilan kebijakan harus didasari oleh pendekatan politik.

Seperti yang disebutkan oleh Hettne dan Hoggott, regionalism tidak hanya melihat negara sebagai aktor utama, maka sudah selayaknya Jepang melibatkan aktor non-negara agar tetap bisa berinvestasi di Inggris dengan keuntungan yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan peran aktor non negara semakin meningkat dilatarbelakangi oleh perkembangan globalisasi ekonomi. Selain itu, *Product Cycle* sebaiknya tetap dipertahankan oleh Jepang yaitu dengan berinovasi, mengembangkan pasar baru dan mencari standarisasi dari produk yang diciptakan sesuai dengan riset yang berkembang dari waktu ke waktu.